

Demokrasi dan Nasionalisme Ekonomi di Tengah Krisis Ekonomi dalam Era Globalisasi

Tjuk K Sukiadi

Indonesia kini sedang dilanda prahara ekonomi. Karena bangsa kita adalah bangsa yang mungkin sudah *ndablek* maka bangsa kita bisa tenang-tenang saja. Di Thailand, karena krisis, perdana menteri sudah digantikan. Di Korea Selatan juga sudah ganti presiden yang baru. Sedangkan kita tenang. Saya kuatir kita ini tenang tetapi kita hanyut bersama nanti. Sejak awal memang pemerintahan Orde Baru ini telah salah berpihak dalam pembangunan ekonomi ini

Jadi kalau sekarang kita ramai bicara masalah HAM, masalah demokrasi politik, pemerintah tidak bisa menjawab, karena memang strategi dan janjinya bukan itu. Strategi dan janjinya hanya sekedar membuat rakyat kenyang.

Karena itu, selama 30 tahun Pak Harto juga sukses memimpin kita asal ukurannya adalah perut kita kenyang. Dan kita tidak pernah berbuat apapun. Krisis terjadi ketika ekonomi tidak bisa membuat rakyat kenyang.

Krisis ekonomi Indonesia sekarang itu sudah masuk kepada faktor-faktor yang sangat manusiawi. Bukan lagi fundamental ekonomi, bukan lagi cadangan devisa, bukan lagi komitmen IMF. Selama ini yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi kita adalah permainan angka-angka itu.

Yang paling bertanggungjawab atas krisis ekonomi ini adalah Soeharto.

Kalau dilihat dari konstitusi kita, demokrasi ekonomi yang ditulis sesuai pada UUD'45 mulai dari pasal 27 tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan pasal 33 serta pasal 34 tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, maka sebenarnya negara kita seharusnya adalah negara sosialis.

Orang Indonesia memang paling pinter untuk berbuat sesuatu yang lain dari apa yang dituliskan. Menteri keuangan kita mengatakan bahwa utang swasta sudah lebih dari 60% dari utang pemerintah dan kalau mestinya pada UUD 1945 itu negara yang diberi kekuasaan untuk punya kekuasaan lebih besar, mempunyai kekuasaan monopoli.

Tapi dalam praktik, secara berangsur-angsur dan pasti terjadi suatu pergeseran. Mestinya negara yang berkuasa, tetapi menjadi seseorang secara mempribadi. Tidak jarang terlihat bahwa monopoli dicabut dari negara dipindahkan kepada swasta.

UUD 1945 itu sekedar seperti keris Jawa. Keris Jawa itu hanya dipuja-puja, dikutuki, dimandikan pada bulan Sura, untuk kemudian disimpan lagi selama setahun berikutnya. Kalau orang Jawa, termasuk orang yang hebat sekalipun, punya kerja maka ia pinjam keris yang bukan asli. Jadi selama ini orang Indonesia ini hidup dengan keris-kerisan gitu. Bukan keris yang beneran.

Masalahnya krisis ekonomi sudah memasuki krisis kepercayaan. Hanya kita

paling pintar berkilah. Ketika rupiah makin jatuh karena kebetulan presiden cuti, dikatakan bahwa ini menunjukkan betapa Soeharto merupakan faktor stabilitas. Orang Indonesia selalu melihat sisi "untung", bahwa kakinya patah, "untung" tidak mati. Tapi kalau orangnya mati, dikatakan "untung" mati, kalau hidup cacat.

Kemudian masalah nasionalisme ekonomi. Anda melihat bahwa konglomerat Indonesia itu memang ketika diajak sebagai partner pembangunan oleh pemerintah untuk membuat sekadar perut rakyat kenyang tidak dilandasi dengan nasionalisme. Jadi tidak tepat kalau kita menuntut mereka nasionalis. Karena tadi institusi negara sudah bergeser kepada pribadi maka konglomerat Indonesia juga -ormasnya- pada pribadi tadi.

Anda melihat bahwa sudah banyak disinyalir sejak beberapa tahun yang lampau perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu mulai memindahkan asetnya, atau paling tidak kontrol manajemennya, ke Singapura. Oom Liem bukan konglomerat pertama. Eka Cipta Wijaya sudah lebih dahulu. Padahal globalisasi ekonomi itu dimulai dari sektor keuangan dan perbankan. Jadi pemerintah bisa saja menyita pabrik tetapi kalau dananya dikendalikan dari Singapura, maka penyitaan itu tidak ada artinya.

Nasionalisme ekonomi dari para pelaku ekonomi besar itu memang sejak awal bukan merupakan persyaratan ketika Orde Baru ini mulai membenahi perekonomian kita. Jadi kira-kira persona atau personel yang sekarang atau tokoh yang sekarang sangat berkuasa ini berapa tahun lagi diharapkan dapat melindungi kepentingan konglomerat yang selama ini menjadi partner.

Kalau banyak konglomerat sudah mulai memindahkan asetnya haruslah dilihat sebagai suatu antisipasi dari bisnis ini untuk menyelamatkan diri. Sinyalemen dari Dorojatun Kuncoro-yakti bahwa 80 miliar US dollar itu adalah milik orang Indonesia di luar negeri.

Jadi orang Indonesia itu punya simpanan 80 miliar dollar di luar negeri. Kita jungkir balik mencari pinjaman kepada IMF sekitar 23 miliar. Jadi, sulit meminta supaya orang yang punya duit itu nasionalis, patriotik, karena mereka sudah menjadi penduduk dunia.

Hanyalah kita yang bukan konglomerat yang memikirkan ekonomi Indonesia. Karena satu-satunya harapan pada ini. Para konglomerat tidak bisa diharapkan. Semakin pengusaha-pengusaha besar melihat bahwa figur pelindung ini semakin melemah maka apa yang dikerjakan, logis saja mereka tidak mau rugi kemudian memindahkan aset mereka.

Ini bukan persoalan konglomerat nonpribumi atau pribumi, karena dalam soal uang ini yang pribumi pun sama saja. Pejabat pemerintahan pun yang sudah punya simpanan satu juta dollar tidak akan menyimpan dalam bentuk dollar di Indonesia, tetapi memasukan di Citibank di Surabaya tetapi mohon dicatat sebagai simpanan di Citibank Singapore.

Orang itu semakin kaya jadi semakin tidak nasionalis dan semakin tidak patriotik. Umumnya begitu. Mungkin ada perkecualian, tetapi sangat kecil sekali. Jadi oleh karena itu tentu harus ada perubahan-perubahan besar pada konsep ekonomi kita di masa yang datang.

Jadi kalau generasi saya ini adalah generasi yang sebenarnya oleh Orde Lama ketika saya mahasiswa kan Orde Lama yang menyiapkan kami itu disiapkan untuk makan batu, kan gitu. Jadi ketika ikut Pak Harto ikut

kenyang perutnya, bisa pakai hem batik yang bagus. Jadi sebetulnya surprise-surprise gitu.

Generasi muda sekarang inilah yang justru harus berfikir bahwa 'the day of winding rose is over'. Anda harus ke depan. Kita harus kerja keras, harus efisien dan efektif, dan berani memperjuangkan hak kita.

Kalau dulu sentralisasi itu untuk supaya memerintah lebih efektif, sekarang sentralisasi supaya mencari duit lebih efektif. Itulah sebabnya, mengapa pemerintah pusat selalu enggan untuk memberikan delegasi pada pemerintah yang di bawah karena bila kewenangan dipindahkan ke tingkat I atau ke tingkat II maka mereka akan rugi karena setiap keputusan itu mempunyai harga. Artinya, dari ujung penanya para pejabat bisa dapat uang. Jujur saja, mengurus kartu penduduk (KTP) saja pakai uang.

Jadi di Indonesia hanya tiga kemungkinan. Harus punya pangkat, karena kalau punya pangkat urusannya cepet dilayani. Harus punya duit, karena kalau punya duit tidak harus mengurus sendiri, karena semua servis ada tarifnya. Kemudian harus punya teman, karena kalau punya teman apalagi yang sedang berkuasa bisa serba dipermudah.

Jadi kalau jadi guru paling *banter* kalau *mentolo* saja, apakah kita mau *mentolo* meres mahasiswa kita. Mudah-mudahan orang Unair belum begitu, mudah-mudahan belum. Oleh karena itu, di dalam seminar di Yogya dikatakan bahwa pemerintah kita sudah tidak mampu. Jadi kesimpulan seminar Yogja tanggal 20 September yang lampau, dikatakan pemerintah kita sudah tidak mampu.

Kalau kita lihat siapa yang paling tidak siap menghadapi globalisasi dunia ini adalah pemerintah Republik Indonesia. Sebagai akibat ketidakmampuan pemerintah ini, maka rakyat juga tidak mampu.

Karena apa? Pemerintah yang mestinya melindungi rakyat dengan intervensi-intervensinya, pemerintah masih mempunyai kewenangan untuk membuat pemerataan yang lebih merata dan sebagainya, kemudian kepentingan rakyat itu mendapatkan perhatian dan sebagainya.

Tetapi peran pemerintah ini tidak bisa efektif. Karena apa? Menurut Bambang Soedibyo, kualitas pemerintah kita sudah begitu rendah sekali. Jadi kalau melakukan intervensi, malah melakukan intervensi yang salah. Mestinya intervensi itu menguntungkan rakyat, tetapi yang terjadi justru malah tidak menguntungkan rakyat.

Oleh karena itu, dikatakan bahwa kita harus mengadakan *reinventing the government* dan bagaimana pun yang namanya *clean and effective government* itu harus menjadi persyaratan mutlak. Kalau dari pemilu ke pemilu pemerintah yang berdiri di bawah presiden siapa pun itu tidak mempunyai target utama membentuk suatu pemerintahan yang *clean and effective government*, maka semua yang lain akan sia-sia saja.

Kalau kita tahu bahwa sekarang kita menghadapi masalah, kita punya *moral obligation*. Mungkin kita berpikir perlu adanya *moral movement* karena kita bisa menjadi *moral force*. Jadi untuk itu perlu ada *moral courage* dan di situlah kita sekarang paling rawan.

Semua orang pada tiarap sekarang ini, sebagian besar malah sudah mencari lubang

perlindungan. Jadi kalau sudah menggali lubang perlindungan, tidak tahu lagi depan mana belakang mana. Oleh karena itu inilah PR besar bangsa kita.

Pak Tandyo adalah salah seorang senior kita yang telah sejak awal menyebarkan virus-virus kepedulian bangsa kita, kepada nasib bangsa ini.*****